



Akibat hukum pemisahan unit usaha Syariah (UUS) Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah di  
 tinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan  
 SIANTURI, Ronald Hasudungan, Pitaya, S.H., M.Hum  
 Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## **AKIBAT HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN**

### **Intisari**

Oleh

Ronald Hasudungan Sianturi<sup>1</sup> Pitaya<sup>2</sup>

Tujuan dari penulisan tesis dengan judul “Akibat Hukum Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Ditinjau Dari Apek Ketenagakerjaan” ini adalah untuk mengetahui status hubungan kerja bagi Pekerja di UUS Bank Umum Konvensional dan peran Pemerintah dalam menerapkan hubungan industrial yang harmonis dalam hal terjadi pemisahan UUS Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan (BUS Hasil Pemisahan).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji aspek asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum serta sistematika hukum yang dikaitkan aspek ketenagakerjaan dalam pemisahan UUS Bank Umum Konvensional menjadi BUS Hasil Pemisahan. Titik berat penelitian terletak pada penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui studi dokumen atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pemisahan perusahaan. Penelitian kepustakaan tersebut ditunjang dengan penelitian lapangan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hubungan kerja Pekerja UUS tidak mengalami perubahan setelah pemisahan UUS Bank Umum Konvensional. Sehubungan dengan penutupan usaha syariah Bank Umum Konvensional dan kebutuhan BUS Hasil Pemisahan atas pekerja untuk melaksanakan operasional perbankan syariah, maka, para pihak diharapkan dapat melakukan penyesuaian perjanjian kerja.

Bank Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi dapat berperan untuk menerapkan hubungan industrial yang harmonis melalui penetapan kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan pemisahan perusahaan, pelayanan layanan sebagai mediator dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, dan mendorong pembentukan sarana hubungan industrial di BUS Hasil Pemisahan (antara lain serikat pekerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama dan LKS Bipartit).

**Kata kunci:** hubungan kerja, pemisahan perusahaan, unit usaha syariah (UUS).

<sup>1</sup> Siadari & Partners Law Firm

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Akibat hukum pemisahan unit usaha Syariah (UUS) Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah di tinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan  
SIANTURI, Ronald Hasudungan, Pitaya, S.H., M.Hum  
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## **SPIN OFF SHARIA BUSINESS UNIT (UUS) OF CONVENTIONAL PUBLIC BANK TO BE SHARIA PUBLIC BANK VIEWED FROM EMPLOYMENT LAW PRESPECTIVE**

### **Abstract**

By

Ronald Hasudungan Sianturi <sup>1</sup> Pitaya <sup>2</sup>

This thesis objective with the title "Spin Off Sharia Business Unit (UUS) of Conventional Public Bank to Be Sharia Public Bank Viewed From Employment Law Prespective" are to know the employment status for workers in the Sharia Business Unit (UUS) Conventional Public Bank and Government role in implementing the industrial relation harmony in the case of spin off Sharia Business Unit (UUS) of Conventional Public Bank to Be Sharia Public Bank.

This research is a normative juridical research that examine the legal principles, and the legal systematics associated with the aspects of employment law in spin off Sharia Business Unit (UUS) of Conventional Public Bank Separation to be Sharia Public Bank. The research emphasis lies in the literature research conducted through documentary study of primary materials and secondary materials relating to employment law and separation of the company. Literature research supported by field research in The Ministry of Manpower and Transmigration, Bank Indonesia, the Indonesian Employers' Association, and PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The research showed that the employment status for workers in Sharia Business Unit (UUS) Conventional Public Bank was not changed after the spin-off.

In connection with the closing of Sharia Business and Sharia Public Bank needs for workers to carry out Islamic banking operations, the parties are expected to make adjustments to the agreement.

Bank Indonesia and the Ministry of Manpower and Transmigration could contribute to implementing a harmonious industrial relations through the employment policies related to the spin off company, a mediator for industrial relations disputes, and encourages the industrial relations device in BUS (etc. unions, company regulations / collective labor agreement and bipartite cooperation).

**Keywords:** labor relation, separation of the company, sharia business unit (UUS).

---

<sup>1</sup> Siadari & Partners Law Firm

<sup>2</sup> Faculty Law, Gadjah Mada University